

Menuju *Multitude*: Gerakan Mahasiswa “Bali Tidak Diam” Diantara Pengorganisasian dan Diversitas

Umar Abdurrahman Raharja¹⁾, Bandiyah²⁾, Gede Indra Pramana³⁾.

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: marzshaarawy@gmail.com¹, dyah_3981@unud.ac.id², indraprama@unud.ac.id³

ABSTRACT

The research seeks to find Multitude indicators in the student movement "Bali Tidak Diam". This research uses the Multitude theory of Michael Hardt and Antonio Negri. The results of this study are first, in the singularity indicator the writer gets the results, namely the existence of various elements of society and students from various groups who participate in the "Bali Tidak Diam" movement. Second, in the indicators of democracy, the writer gets results, namely the existence of space for expression, equality, the opportunity given to each group from various elements to provide opinions or input in the movement. Third, in the organizational indicators the writer gets the result, namely the independent efforts made by students and the community to enlarge the "Bali Tidak Diam" movement. This research has answered about the creation of a movement that leads to multitude in the "Bali Tidak Diam" movement.

Keywords: student movement, multitude, singularity, democracy

1. PENDAHULUAN

Gerakan mahasiswa di Bali masih minim eskalasinya apabila dibandingkan dengan pergerakan mahasiswa di daerah lain seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Utara, hingga Jakarta. Diantara beberapa daerah tersebut, Bali memiliki posisi tawar yang cukup tinggi untuk penentuan kebijakan politik nasional dibandingkan beberapa daerah tersebut mengingat posisinya sebagai penyumbang devisa terbesar dan wilayah pariwisata utama nasional yang harus dijaga stabilitas kondisi sosial politiknya.

Dalam beberapa gejolak sosial politik nasional pasca reformasi, mahasiswa di Bali turut ikut mengawal polemik atas kebijakan dan situasi sosial politik yang terjadi. Namun,

gerakan yang dilakukan mahasiswa di Bali tersebut masih bersifat spontan, reaksioner dan tidak terorganisir dengan menyeluruh, sehingga eskalasi gerakan yang terjadi sangat kecil dan hanya melibatkan beberapa kelompok mahasiswa.

Berbeda dari beberapa gerakan mahasiswa di Bali sebelumnya, pada September 2019 mahasiswa di Bali berhasil membuat suatu gerakan mahasiswa dengan skala partisipasi yang lebih besar. Gerakan mahasiswa yang terjadi tersebut melibatkan banyak pihak dalam pengorganisasian gerakan serta membangun jaringan gerakan yang luas dengan kelompok masyarakat lainnya. Gerakan tersebut melibatkan banyak elemen masyarakat dan membelah garis kelas yang ada di masyarakat.

Pemantik gerakan mahasiswa pada September 2019 tersebut diantaranya adalah adanya upaya pelemahan KPK melalui proses pemilihan calon pimpinan (Capim) KPK dan Revisi UU KPK. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai bermasalah secara substansial. Rasisme yang terjadi pada warga Papua di Surabaya dan Malang. Serta kondisi kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan yang dinilai akibat kelalaian dari pemerintah. Selain itu, beberapa produk Undang-undang bermasalah yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menambah kekisruhan di masyarakat. Produk yang dihasilkan oleh DPR RI pada tahun 2019 dinilai lebih memprioritaskan undang-undang yang berorientasi kapitalistik seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, RUU Sumber Daya Air, RUU Pertambangan Minerba. Dibandingkan memprioritaskan RUU yang diharapkan oleh masyarakat seperti: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta RUU Masyarakat Adat (Anugrah, 2019).

Gerakan mahasiswa di Bali yang terjadi pada September 2019 bernama Gerakan Bali Tidak Diam. Mahasiswa di Bali berhasil mengorganisir kurang lebih 2.000 mahasiswa serta masyarakat dari berbagai elemen seperti: buruh, mahasiswa, seniman, serta pelajar di Bali turun ke jalan (Bisnis.com, 2019), secara kuantitas, angka tersebut

merupakan angka tertinggi dalam sejarah gerakan mahasiswa di Bali.

Gerakan Bali Tidak Diam merupakan suatu gerakan mahasiswa yang mengkomodir berbagai tuntutan politik dari mahasiswa dan masyarakat yang telah disepakati bersama melalui mekanisme forum. Gerakan Bali Tidak Diam memberikan ruang yang luas bagi berbagai elemen masyarakat untuk memberikan masukan dan poin tuntutan yang dibawa oleh gerakan. Gerakan yang diakomodir oleh mahasiswa ini tidak hanya dimobilisasi dalam ruang publik masyarakat, melainkan masuk ke dalam ruang-ruang kampus.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori *Multitude*

Gerakan politik yang bertujuan untuk transformasi dan pembebasan saat ini hanya dapat dilakukan atas dasar *multitude* (Hardt & Negri, 2004). *Multitude* (kumpulan manusia) merupakan pemikiran yang dicetuskan oleh Michael Hardt dan Antonio Negri. Konsep mengenai *multitude* sangat berbeda dengan konsep kelas pekerja. Kelas pekerja yang membelah masyarakat antara kelompok masyarakat proletar atau borjuasi tersebut dinilai tidak dapat merangkul berbagai kelompok masyarakat dalam merespon berbagai permasalahan sosial politik yang ada saat ini. Individu adalah satu, penduduk terdiri dari banyak individu dan kelas yang berbeda, tetapi dalam pandangan kelas pekerja orang-orang tersebut mensintesis atau mereduksi perbedaan sosial ini menjadi

satu identitas. *Multitude* memiliki pandangan yang kontras, masyarakat tidak bersatu tetapi tetap jamak dan majemuk (Hardt & Negri, 2004).

Multitude menganggap perbedaan antara perjuangan ekonomi dan politik hanya menjadi penghalang untuk memahami hubungan kelas. Perspektif dalam *multitude* ini tidak begitu banyak didasarkan pada eksistensi empiris kelas saat ini, tetapi lebih pada kondisi kemungkinannya untuk melakukan transformasi dan pembebasan. *Multitude* menggunakan kelas pekerja dan kelas sosial ekonomi sebagai dasar analisis yang dapat berfungsi sebagai korektif terhadap kekurangan relatif. Dan salah satu pendekatan awal dalam *multitude* adalah dengan memahami bahwa semua orang yang bekerja di bawah aturan kapital berpotensi sebagai kelas yang menolak aturan kapital (Hardt & Negri, 2004). Maka ada peluang untuk melakukan transformasi dan pembebasan dari kondisi yang ada.

Multitude mendorong agar kelas pekerja dalam sektor-sektor domestik juga dilibatkan dalam suatu gerakan perlawanan. *Multitude* melihat bahwa dalam konsep lain, kelas pekerja dalam ranah domestik seperti: penjual buah, pencuci pakaian, juru masak, dan lain-lain tidak dilibatkan dalam upaya-upaya mendorong suatu perubahan di masyarakat. Keterlibatan kelas pekerja dalam sektor-sektor domestic mengindikasikan adanya kedaulatan yang dimiliki oleh setiap masyarakat.

Multitude dapat dipahami sebagai jaringan. Sebuah jaringan yang didalamnya terdapat berbagai perbedaan yang dapat mengekspresikan diri secara bebas dan setara. Jaringan yang menyediakan sarana pertemuan sehingga masyarakat bisa bergerak dan bertindak bersama. *Multitude* terdiri dari perbedaan internal yang tak terhitung banyaknya dan tidak pernah dapat direduksi menjadi satu ataupun identitas yang satu. Salah satu tantangan yang timbul dalam *Multitude* adalah kondisi keberagaman sosial tersebut mengelola untuk saling berkomunikasi dan mengambil tindakan secara bersama namun tetap mempertahankan perbedaan yang ada dalam internal. Kondisi perbedaan dalam internal tersebut harus ditemukan dalam satu kesamaan atau the commons yang memungkinkan untuk saling berkomunikasi dan bertindak bersama. *Multitude* secara potensial terdiri dari berbagai pihak yang beragam, yang memperluas jangkauan serta jaringan untuk bergabung secara bersama yang membentuk suatu hubungan spiral. Hubungan spiral ini berawal dari berbagai gabungan kelompok yang mengelola suatu local struggle yang kemudian berkembang menjadi suatu jaringan yang meluas yang meliputi berbagai kelompok lainnya dan mampu bergerak dan bertindak secara bersama namun tetap dengan identitasnya tersendiri. *Multitude* melihat bahwa pembentukan suatu tendensi perlawanan dan suatu langkah revolusioner tidak hanya dengan tujuan untuk mencapai masyarakat

demokratis, melainkan dengan menciptakan hubungan demokratis dalam internal struktur gerakan. Seluruh pihak yang tergabung dalam penciptaan *multitude* memiliki kesetaraan posisi dan kedaulatan, sehingga tidak ada satu pihak yang mampu mengokupasi gerakan.

Multitude dapat digambarkan sebagai kumpulan karang yang menyatu menjadi suatu batuan yang keras ditengah lautan, yang kemudian tidak dapat dihancurkan oleh kapal besar sekalipun (Erawan, 2021). Kumpulan karang tersebut merupakan penggambaran dari kumpulan manusia yang beragam, kemudian kapal besar tersebut diibaratkan sebagai negara.

Multitude mampu bertindak secara bersama dan mengatur gerakannya sendiri, berbeda dengan suatu badan politik yang mengharuskan adanya perintah dan orang lain yang patuh. *Multitude* adalah sebuah bentuk living flesh (daging yang hidup) yang mampu mengatur dirinya secara dinamis. Pengaturan dalam *multitude* ditentukan oleh setiap pihak yang terlibat dan ditujukan untuk seluruh pihak yang terlibat.

Perkembangan *multitude* bukan berfokus pada rencana pembangunan negara sosialis ataupun partai progresif, ataupun membangun bentuk modern kedaulatan. Melainkan terletak pada permasalahan sehari-hari dari kondisi kerja yang ada dan berupaya untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Multitude berupaya untuk mengkonstruksi ulang makna kedaulatan yang

ada di masyarakat. Kedaulatan yang dimaksud dalam *multitude* mengarah pada kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat secara mandiri. *Multitude* melihat bahwa kedaulatan yang merujuk pada negara telah gagal memberikan pemenuhan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, *Multitude* melihat bahwa kedaulatan perlu dikembalikan kembali pada setiap masyarakat. *Multitude* mendorong adanya penciptaan alternatif-alternatif dalam pemenuhan kebutuhan hidup di masyarakat, sehingga tidak mengharapkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dari negara.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Jane Ritchie & Jane Lewis (2003), tujuan penelitian kualitatif umumnya diarahkan pada penyediaan pemahaman yang mendalam dan ditafsirkan tentang dunia sosial. Penelitian kualitatif berusaha untuk memahami tentang keadaan sosial, keadaan material, pengalaman, perspektif dan sejarah seseorang.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan adanya indikator-indikator penciptaan *multitude* dalam gerakan “Bali Tidak Diam”.

Penentuan informan ditarik dilakukan menggunakan teknik purposive, teknik yang penentuannya berdasarkan ciri-ciri yang telah ditentukan oleh penulis sebagai informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu: Javents Lumbantobing, I

Nyoman Mardika, Abror Toriq, dan Ni Kadek Vany Primaliraning sebagai informan utama dalam penelitian ini. Serta, Luh De Suriyani, dan Suiya Radja Grimaldi sebagai informan tambahan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi partisipatif, dokumentasi, *focus group discussion* (FGD), serta wawancara mendalam pada subjek yang memiliki kedekatan isu dengan objek penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 3 arus aktivitas berdasarkan Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yaitu: kondensasi data, penyajian data, dan *drawing and verifying conclusions*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemandirian Pengorganisasian Gerakan “Bali Tidak Diam”

Dalam *multitude*, gerakan yang diciptakan harus melalui proses pengorganisasian yang dilakukan secara mandiri oleh pihak yang terkait dengan gerakan. Berkembangnya gerakan diarahkan sesuai dengan tujuan dan agenda gerakan tersebut dibentuk. Dalam mempermudah analisis terhadap adanya kemandirian pengorganisasian gerakan, penulis membagi tiga bagian dalam penggambaran kondisi pengorganisasian gerakan “Bali Tidak Diam” yaitu: prelude, interlude, dan postlude gerakan Bali Tidak Diam.

Prelude

Gerakan “Bali Tidak Diam” tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui perjalanan panjang proses mobilisasi dan pengorganisasian beberapa isu atau permasalahan politik nasional. Mobilisasi dan pengorganisasian yang dilakukan bertujuan untuk membangun keresahan dan juga menampung berbagai elemen dan kelompok masyarakat yang memiliki tujuan dan persepsi yang sama mengenai kondisi yang ada. Nyoman Mardika menjelaskan bahwa landasan semua elemen bergerak adalah keresahan yang sama, kekesalan terhadap kebijakan yang ada selama ini yang diluncurkan oleh rezim, seperti revisi UU KPK dan Rancangan KUHP.

Pemantik awal lahirnya gerakan “Bali Tidak Diam” adalah permasalahan yang terdapat dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK. Sebelumnya, sudah ada gerakan yang mengawal permasalahan mengenai anti korupsi di Bali, kelompok tersebut bernama Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK). Melihat pentingnya keterlibatan mahasiswa dan kemampuan untuk memperluas dan membesarkan gerakan, aliansi yang sudah terbentuk sebelumnya yaitu AMBAK kemudian berkembang menjadi Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Bali Anti Korupsi (AMMBAK) Terdapat penambahan unsur mahasiswa dalam aliansi yang terbentuk tersebut. Setelah langkah awal pengawalan permasalahan calon pimpinan KPK melalui aksi #SaveKPK sebelumnya. Aksi melalui media sosial dengan unggahan foto tagar

#SaveKPK juga dilakukan oleh AMBAK. Selain itu aksi melalui media sosial itu juga menyuarakan untuk penulisan petisi di laman change.org yang bertujuan untuk menggagalkan beberapa calon pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak yang buruk dalam upaya penegakan anti korupsi di Indonesia. Kegiatan diskusi juga dilakukan dengan mengundang pelajar dan mahasiswa yang dilakukan oleh Sahabat ICW dalam rangka pengawalan terhadap upaya pelemahan KPK. Berkumpulnya mahasiswa dalam kegiatan diskusi tersebut melahirkan inisiatif untuk menggelar konsolidasi aksi. Konsolidasi tersebut diikuti oleh berbagai kelompok mahasiswa dan masyarakat seperti, BEM Fakultas dan Universitas di Udayana, LBH, SAKTI Bali, Balebengong, dan berbagai kelompok lainnya. Hasil konsolidasi pasca diskusi Bengkel Antikorupsi memutuskan untuk melakukan aksi pada tanggal 12 September 2019 di depan gedung DPRD Bali. Massa aksi berhasil membuat nota kesepahaman dengan anggota DPRD Bali mengenai penolakan terhadap upaya pelemahan KPK.

Aksi simbolik dengan menyalakan lilin di Monumen Bajra Sandhi, Renon dilakukan oleh AMBAK pada tanggal 15 September 2019. Menyalakan lilin secara bersama-sama tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap adanya pelemahan atas upaya pemberantasan praktik korupsi yang merupakan masa-masa kelam bagi Indonesia. Selain itu, Pada kegiatan Pekan Raya Udayana yang merupakan bagian dari

Dies Natalis Universitas Udayana, Mahasiswa Udayana mengambil kesempatan untuk mendesak secara langsung rektor Universitas Udayana untuk menyatakan sikap.

Seniman di Bali juga turut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya mengenai kondisi sosial politik nasional yang ada. Aspirasi seniman yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dituangkan melalui karya media sosial instagram. Karya tersebut memiliki tema yang berkaitan dengan tuntutan dan permasalahan yang dikawal oleh mahasiswa.

Interlude

Terbentuknya Gerakan “Bali Tidak Diam” merupakan hasil konsolidasi yang dilakukan oleh mahasiswa pada malam hari tanggal 22 September tepatnya di Balebengong Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana. Konsolidasi tersebut dihadiri oleh Presiden Mahasiswa BEM PM Universitas Udayana, SAKTI Bali, dan Komunitas Perpustakaan Jalanan Denpasar. Hasil konsolidasi pada siang hari belum membentuk suatu aliansi besar bernama “Bali Tidak Diam”. Hasil konsolidasi siang hari masih berfokus untuk melakukan kegiatan pencerdasan dan sosialisasi mengenai berbagai kondisi politik nasional yang tengah bergejolak. Selain itu, terdapat juga kegiatan Pos Kongkow yang dicanangkan untuk membuka ruang seluasnya bagi mahasiswa yang ingin mengekspresikan diri, namun saat itu lebih difokuskan untuk melaksanakan

kegiatan sosialisasi agar semakin luas mahasiswa yang berpartisipasi dalam gerakan yang tengah diorganisir oleh mahasiswa tersebut. Aksi sosialisasi tersebut bertemakan Aksi Merawat Nalar, kegiatan yang dilakukan di tiga titik terpisah tersebut dilaksanakan secara serentak. Ketiga titik tersebut diantaranya adalah: Kampus Sudirman, Kampus Bukit, serta Kampus Sanglah. Setelah kegiatan aksi merawat nalar tersebut usai, mahasiswa kembali berkoordinasi dengan berbagai elemen lainnya untuk segera melaksanakan konsolidasi kembali pada malam harinya, mengingat situasi politik nasional yang semakin memanas dan bergerak secara cepat. Berbagai elemen masyarakat seperti Seniman, Musisi, Jurnalis, dan LSM juga turut menyuarakan agar masyarakat secara umum terlibat dalam aksi yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 September 2019 di Monumen Bajra Sandhi, Renon.

Aksi pada tanggal 24 September 2019, aksi yang bertajuk "Bali Tidak Diam" tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Jumlah massa aksi yang mencapai 2.000 lebih tersebut menjadi fenomena yang mengejutkan banyak pihak dikarenakan histori gerakan mahasiswa sebelumnya yang belum pernah melibatkan banyak elemen masyarakat dan mahasiswa. Aksi berupa *longmarch*, orasi, mural, dan pembentangan poster. Pasca aksi 24 September 2019 yang mengejutkan banyak pihak tersebut, upaya menjaga eskalasi gerakan tersebut masih diupayakan oleh berbagai pihak yang

terlibat. Diantaranya kegiatan yang dilakukan oleh Seniman di Bali dengan cara mengumpulkan tanda tangan masyarakat.

Melihat kebijakan politik nasional yang tidak merespon secara cepat gerakan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, mahasiswa di Bali melakukan gerakan yang merupakan tindak lanjut dari gerakan sebelumnya untuk sekali lagi memastikan bahwa masyarakat Bali menolak beberapa kebijakan politik nasional yang tidak berpihak tersebut. Aksi lanjutan pada tanggal 30 September 2019 tersebut ingin menunjukkan bahwa gerakan di Bali tidak berhenti dan tidak diam pasca tanggal 24 September 2019, melainkan terus mengawal dan menyuarakan aspirasinya.

Postlude

Gerakan yang diorganisir oleh mahasiswa tersebut berhasil membuat kekhawatiran dalam tubuh stakeholder-stakeholder yang berkaitan dengan tuntutan ataupun pihak yang menjadi sasaran dari kritik yang dilangsungkan oleh mahasiswa tersebut. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali merespon gerakan yang diorganisir oleh mahasiswa tersebut. Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Bali melalui perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa masing-masing diundang oleh Gubernur Bali dalam rangka merespon demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Bali pada tanggal 24 September 2019. Undangan yang bertajuk simakrama tersebut tidak lain tidak bukan adalah untuk meredam gerakan

mahasiswa dengan langkah menyerap aspirasi mahasiswa secara langsung.

Senada dengan langkah yang diambil oleh pemerintah daerah provinsi Bali, Rektorat Universitas Udayana juga menggelar penjaringan aspirasi mahasiswa Universitas Udayana yang diwakili melalui Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas dan Fakultas. Dalam kegiatan tersebut rektorat mengundang perwakilan dari Kementerian Pertahanan sebagai salah satu pemateri. Penjaringan aspirasi yang dilakukan sarat dengan upaya intervensi mengenai langkah yang diambil oleh mahasiswa dengan cara menyampaikan isi muatan materinya tentang deradikalisasi. Hal ini seakan-akan mengira gerakan yang diorganisir oleh mahasiswa kental dengan kepentingan radikalisme. Muatan pembahasan mengenai permasalahan yang dikritisi oleh gerakan mahasiswa sangat minim dan tidak mendapatkan pembahasan lebih lanjut.

Sumber Pendanaan Gerakan “Bali Tidak Diam”

Sumber dana yang digunakan oleh gerakan “Bali Tidak Diam” bersifat patungan dari setiap pihak yang terlibat dalam gerakan. Hal tersebut dijelaskan oleh Javents Lumbantobing bahwa sistem yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan gerakan melalui patungan dari setiap pihak yang terlibat. Selain itu, kebutuhan peralatan yang sekiranya dimiliki oleh salah satu pihak, maka peralatan tersebut akan dipinjamkan.

Melihat sumber dana yang berasal dari pihak internal yang terlibat gerakan, maka sulit untuk pihak eksternal mempengaruhi agenda ataupun tujuan dari gerakan yang terbentuk. Sistem patungan dan memenuhi satu sama lain tersebut menunjukkan bahwa gerakan yang dibentuk merupakan gerakan yang memiliki kemandirian dalam pengorganisasiannya.

Singularitas dalam Gerakan “Bali Tidak Diam”

Singularitas merupakan salah satu faktor penting dari konsep *multitude*. Singularitas merupakan suatu keunikan yang dimiliki oleh setiap individu yang tergabung dalam kelompok. Hardt & Negri menyebutnya sebagai *plural singularities*. Hal yang dimaksud oleh Hardt & Negri tersebut adalah sebuah kelompok atau gerakan yang berisikan berbagai elemen masyarakat yang beragam namun tidak mereduksi identitas dari setiap kelompok yang bergabung menjadi satu ciri atau identitas yang sama. Hardt & Negri menjadikan singularitas sebagai faktor penting terciptanya *multitude* bertujuan untuk memisahkan *multitude* dari pandangan bias yang mengarah pada konsep lain seperti *the masses*, *the crowd*, and *the mob*.

Gerakan “Bali Tidak Diam” merupakan gerakan yang singular. Faktor awal yang dapat membantu untuk melihat gerakan “Bali Tidak Diam” adalah suatu gerakan yang singular yaitu dengan melihat elemen-elemen yang terlibat dalam gerakan “Bali Tidak

Diam". Elemen masyarakat dan mahasiswa bergabung dalam satu wadah yang sama namun memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Elemen masyarakat yang berpartisipasi dalam gerakan "Bali Tidak Diam" diantaranya adalah: LBH Bali, Manikaya Kauci, AJI Denpasar, Balebengong, Taman Baca Kesiman, The Pojoks, Gus Dark Art, Navicula. Terdapat juga keberagaman dalam unsur mahasiswa yang berpartisipasi dalam gerakan, yaitu: BEM PM Universitas Udayana, BEM Undiknas, BEM KBM PNB, BEM Universitas Warmadewa, GMNI Denpasar, KAUM, SDMN Bali, Perpustakaan Jalanan Denpasar, Teater Orok, Pers Akademika, SAKTI Bali.

Kondisi yang terbentuk seperti yang digambarkan diatas dengan hadirnya berbagai elemen dalam gerakan yang diorganisir oleh mahasiswa tersebut memperkuat tanda adanya singularitas dalam gerakan "Bali Tidak Diam". Penggambaran mengenai singularitas dalam hal komposisi kelompok atau elemen masyarakat yang terlibat merupakan salah satu cara yang bisa menunjukkan keberagaman dari terciptanya *multitude*.

Hardt & Negri tidak mengingkan adanya reduksi identitas didalam kumpulan manusia atau berbagai kelompok tersebut menjadi satu. Hardt & Negri mendorong adanya pengorganisasian ditengah-tengah perbedaan yang ada untuk mencapai tujuan. Kondisi keberagaman tersebut tergambar juga dalam intrik yang terjadi selama

pengorganisasian gerakan "Bali Tidak Diam". Dalam prosesnya terdapat perdebatan mengenai tuntutan ataupun tujuan dari gerakan yang akan dibentuk tersebut. Meskipun terjadi intrik diantara berbagai kelompok yang tergabung, namun pada akhirnya gerakan tersebut tetap bergerak dan menampung berbagai perbedaan yang ada.

Singularitas dalam *multitude* juga dipertegas lagi oleh Hardt & Negri sebagai suatu singularitas yang utuh, tidak mereduksi dan memaksakan adanya penyatuan dari perbedaan-perbedaan yang ada. Kondisi singularitas dalam kelompok harus tetap terjaga dengan ciri dan coraknya masing-masing. Meskipun bergabung dalam satu wadah gerak yang sama, bukan berarti ciri atau corak tersebut dihilangkan dan melebur menjadi satu identitas. Salah satu contoh bentuk keragaman yang ada dalam gerakan "Bali Tidak Diam" ialah keberagaman dalam mengekspresikan pesan sesuai dengan identitas ataupun corak yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang tergabung dalam gerakan "Bali Tidak Diam".

Demokrasi dalam Gerakan "Bali Tidak Diam"

Demokrasi merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam menciptakan *multitude*. Dalam konsep *multitude* menuntut adanya inklusifitas dan keterbukaan pada semua bagian, baik dalam struktur dan pengorganisasian, maupun sosial subjek yang terlibat harus terjamin keterbukaannya.

Selain itu, sifat dari gerakan juga harus terbuka dan inklusif.

Ni Kadek Vany Primaliraning menggambarkan kondisi gerakan yang terbuka dengan mengundang segala pihak yang terlibat untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan gerakan. Kondisi gerakan yang berisikan dari berbagai elemen masyarakat seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya juga mengkonfirmasi keterbukaan dari gerakan “Bali Tidak Diam”. Gerakan tersebut juga terbuka setiap saat terhadap kelompok atau individu yang ingin bergabung dalam gerakan. Inklusifitas dari gerakan “Bali Tidak Diam” tidak diragukan lagi melihat kondisi yang ada, dan inklusifitas gerakan merupakan salah satu bentuk yang harus ada dalam konsep *multitude*.

Salah satu unsur lainnya agar terciptanya *multitude* dalam gerakan adalah dengan tidak adanya pemimpin tunggal yang mampu mengintervensi gerakan. Tidak ada pihak yang mempunyai kuasa untuk mengokupasi gerakan dengan kepemimpinan tunggal. Hal ini dikarenakan konsep *multitude* menggunakan relasi demokratis dalam pengorganisasiannya, sehingga seluruh individu atau kelompok yang terlibat dalam gerakan memiliki porsi dan kekuatan yang sama untuk mengorganisir gerakan. Hardt & Negri melihat bahwa perlawanan tidak hanya dibentuk dari masyarakat yang demokratis, melainkan dari relasi demokratis dalam struktur organisasi gerakan. Pentingnya tidak ada pemimpin tunggal dalam gerakan

disadari oleh gerakan “Bali Tidak Diam”. Dalam prosesnya, gerakan “Bali Tidak Diam” menyetarakan seluruh pihak yang terlibat. Seluruh kelompok atau individu yang terlibat memiliki wewenang untuk melakukan inisiatif dalam merumuskan eskalasi gerakan. Tidak ada komando tunggal yang menentukan eskalasi gerakan “Bali Tidak Diam”. Unsur demokratis lainnya dalam konsep *multitude* ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan gerakan harus disepakati dan ditentukan secara bersama-sama. Abror Toriq dan Javents Lumbantobing mengkonfirmasi pernyataan bahwa pengambilan keputusan atau segala hal yang berkaitan dengan gerakan diambil sesuai dengan kesepakatan forum yang melibatkan seluruh pihak yang tergabung dengan gerakan “Bali Tidak Diam”. Forum merupakan pimpinan tertinggi dalam gerakan “Bali Tidak Diam” yang didalamnya menciptakan segala keputusan yang berkaitan dengan gerakan.

Konsep *multitude* menuntut adanya aturan main yang dibuat secara bersama-sama dan disepakati bersama-sama. Maksud dari adanya aturan main tersebut ialah untuk mengontrol gerakan agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan bersama. Terlibatnya banyak corak kelompok atau individu yang tergabung dalam gerakan memerlukan aturan main yang jelas agar tetap merangkul berbagai pihak, tidak hanya menjadi ciri yang khas atas suatu pihak. Kondisi tersebut tergambar juga dalam gerakan “Bali Tidak Diam”. Aturan main yang diatur dalam gerakan tersebut bertujuan untuk

memastikan bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki kemampuan yang sama untuk mengorganisir gerakan.

Aturan main atau keputusan yang diambil oleh gerakan tersebut juga bersifat dinamis, tidak statis. Aturan main atau keputusan disesuaikan dengan kebutuhan gerakan, sehingga bisa berubah-ubah yang disepakati melalui mekanisme forum secara bersama-sama. Gerakan “Bali Tidak Diam” seiring dengan berkembangnya gerakan dan evaluasi yang dilakukan setiap langkahnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada dalam gerakan. Seperti yang dijelaskan oleh Javents Lumbantobing bahwa gerakan “Bali Tidak Diam” bersifat dinamis, karena melihat perkembangannya yang dari yang awal komunikasinya masih belum baik terkait konteks dan taktis gerakan sehingga kemudian berjalan lebih baik lagi kedepannya, dan gerakan menjadi lebih besar”.

Hardt & Negri melihat demokrasi sebagai suatu hal yang luas. Tidak hanya mengenai pengorganisasian dan komposisi gerakan yang harus demokrasi, melainkan hal-hal yang dibahas ataupun yang dijadikan tuntutan suatu gerakan juga harus demokratis. Semua pembahasan atau tujuan utama dari gerakan harus dibicarakan secara sama-sama dan dapat disepakati secara bersama. Gerakan tidak membuat suatu tuntutan yang hanya mewakili satu pihak, melainkan melibatkan seluruh pihak dalam pembahasannya. Dalam hal ini gerakan “Bali

Tidak Diam” melakukan hal yang serupa dengan konsep yang dijelaskan oleh Hardt & Negri, permasalahan atau tuntutan yang dibawa oleh gerakan “Bali Tidak Diam” tidak serta merta dapat masuk begitu saja. Terdapat suatu pembahasan secara bersama-sama untuk menambahkan suatu tuntutan yang belum disepakati sebelumnya.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Pertama, adanya singularitas yang terbentuk dalam gerakan “Bali Tidak Diam”. Dalam pembuktian adanya singularitas dalam gerakan “Bali Tidak Diam”, penulis menganalisis keterlibatan berbagai pihak yang terlibat dalam gerakan “Bali Tidak Diam”. Keterlibatan berbagai elemen elemen masyarakat dan mahasiswa itu diwakilkan oleh berbagai kelompok atau individu yang terlibat dalam gerakan. Seniman, Musisi, Jurnalis, Pelajar, Mahasiswa, Pegiat Lingkungan, dan LSM terlibat dalam gerakan “Bali Tidak Diam”. Berbagai mahasiswa yang terlibat juga dapat diidentifikasi sebagai entitas yang berbeda. Selain itu, penulis juga menganalisis identitas dari kelompok atau individu yang terlibat dalam gerakan “Bali Tidak Diam”. Analisis tersebut dapat dibaca melalui bentuk ekspresi yang dilakukan dalam rangkaian gerakan hingga latar belakang yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam gerakan “Bali Tidak Diam”.

Kedua, adanya unsur-unsur demokrasi yang dilakukan dalam pengorganisasian gerakan “Bali Tidak Diam”. Dalam pembuktian adanya unsur-unsur yang

menunjukkan gerakan “Bali Tidak Diam” demokratis, penulis menganalisis hasil temuan yang mengarah pada tidak adanya pemimpin tunggal dalam gerakan, kesepakatan dan aturan main yang diatur melalui mekanisme forum, hingga adanya ruang kesempatan yang sama bagi setiap kelompok atau individu yang terlibat dalam gerakan untuk memberikan arahan dan masukan dalam eskalasi gerakan “Bali Tidak Diam”.

Ketiga, gerakan mahasiswa melakukan kemandirian pengorganisasian diantara perbedaan atau diversitas yang ada dalam gerakan “Bali Tidak Diam”. Dalam pembuktian adanya kemandirian pengorganisasian atas perbedaan atau diversitas tersebut, penulis menganalisis berbagai perbedaan yang tercipta dalam proses pengorganisasian gerakan “Bali Tidak Diam”. Perbedaan yang ada diantaranya, perbedaan mengenai permasalahan atau isu yang diagendakan hingga perbedaan mekanisme teknis gerakan. Gerakan “Bali Tidak Diam” yang diorganisir secara mandiri oleh mahasiswa tersebut berhasil untuk mengelola perbedaan yang bersifat kontekstual maupun taktis. Perbedaan yang ada tersebut tidak diredam melainkan diorganisir secara mandiri agar menemukan titik temu kesepakatan diantara kelompok atau individu yang terlibat. Perbedaan dalam hal kontekstual berkaitan dengan agenda yang dituju oleh gerakan. Banyak terjadi konfrontasi mengenai rencana agenda yang ingin dimasukkan dalam tuntutan gerakan,

namun hal tersebut berhasil diorganisir melalui diskusi secara bersama-sama hingga akhirnya disepakati untuk menerima atau menolak rencana agenda tersebut. Selain itu, dalam hal taktis juga terdapat berbagai perbedaan mengenai teknis aksi, namun mahasiswa mampu mengorganisir dan mengelola berbagai masukan yang ada.

Meskipun ketiga indikator penciptaan *multitude* terpenuhi, berdasarkan data yang penulis temukan juga menunjukkan masih belum terpenuhi karakteristik penciptaan *multitude* dalam gerakan “Bali Tidak Diam”. Karakteristik *multitude* yang belum terpenuhi dalam gerakan “Bali Tidak Diam” yaitu: pertama, tidak adanya pengetahuan baru mengenai pengorganisasian yang dibentuk dalam gerakan “Bali Tidak Diam”. Pengorganisasian gerakan belum berorientasikan pada pengorganisasian lanjutan, pengorganisasian masih sebatas pada agenda penolakan kebijakan. Pengorganisasian masih bentuk lama dan metode yang berulang seperti konsolidasi mendadak dan aksi turun ke jalan, belum mengarah pada pengorganisasian yang mendorong pergeseran kedaulatan.

Serta kedua, Tidak adanya diskursus mengenai kedaulatan alternatif yang digaungkan dalam internal gerakan “Bali Tidak Diam”. Gerakan masih berfokus pada penolakan terhadap kebijakan yang dilahirkan oleh negara, pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan belum melahirkan diskursus mengenai kedaulatan yang dapat dicapai oleh setiap pihak yang terlibat dalam

gerakan. Kesadaran atas kedaulatan yang dimiliki oleh setiap pihak masih belum terbentuk dalam gerakan. Sehingga diskursus mengenai kedaulatan alternatif tidak beredar pada setiap pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan. Diskursus tersebut juga tidak terbangun dikarenakan masih banyak pihak-pihak yang tergabung karena terdorong oleh lingkungan sekitar, bukan atas kesadaran pribadi atas agenda yang ditujukan oleh gerakan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan yang mengarahkan pada pemenuhan indikator-indikator yang diperlukan dalam penciptaan *multitude*, penulis melihat gerakan “Bali Tidak Diam” mengarah pada gerakan yang menciptakan *multitude*. Gerakan “Bali Tidak Diam” mampu memenuhi indikator-indikator penting dalam *multitude* yang berupa kemandirian pengorganisasian, singularitas, dan demokrasi.

Meskipun mengarah pada penciptaan *multitude*, namun penulis menyimpulkan bahwa gerakan “Bali Tidak Diam” belum berhasil menciptakan *multitude*. Hal ini didasari dari temuan penulis yang melihat bahwa belum terpenuhinya karakteristik *multitude* dalam gerakan “Bali Tidak Diam” yaitu: Tidak adanya pengetahuan baru yang dilahirkan dalam pengorganisasian gerakan “Bali Tidak Diam”. Metode pengorganisasian masih berupa pengulangan dari bentuk gerakan secara umum. Selain itu, tidak terbangunnya diskursus mengenai

kedaulatan alternatif dalam gerakan “Bali Tidak Diam”. Kesadaran atas kedaulatan yang dimiliki oleh setiap pihak belum terbangun dalam gerakan “Bali Tidak Diam. Penulis mendapatkan temuan masih terdapatnya individu-individu yang terlibat dalam gerakan “Bali Tidak Diam” belum memahami sepenuhnya agenda dan tujuan dari gerakan. Individu tersebut masih bersifat partisipatif semata dan terdorong untuk terlibat yang didasari oleh keterlibatannya lingkungan sekitar dari individu tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa gerakan “Bali Tidak Diam” yang diorganisir oleh mahasiswa mengarah pada penciptaan *multitude*. Namun, mahasiswa di Bali belum berhasil menciptakan *multitude* dalam gerakan “Bali Tidak Diam”.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ford, M. (2013). *Social Activism in Southeast Asia*. New York: Routledge.
- Ford, M., & Dibley, T. (2019). *Activist in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia*. Southeast Asia: Cornell University Press.
- Hardt, M., & Negri, A. (2004). *Multitude: War and democracy in the age of Empire*. New York: The Penguin Press.
- Ritchie, J., & Lewis, J. (2003). *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers*. London: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Park, R. E., & Burgess, E. W. (1924). *Introduction to the Science of Sociology*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Sanit, A. (1981). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- Weiss, Meredith, L., & Aspinall, E. (2012). *Student activism in Asia: Between protest and powerlessness*. Minneapolis: University of Minnesota Press
- Artikel Jurnal:**
- Abdul, H. K. (2019). *Demonstrasi Tanpa Pemimpin*. Jawapos.
- Alakavuklar, O. (2017). *Anti-Capitalist Entrepreneurship: Lesson about and for the Multitude*. Oxford University Press.
- Anugrah, I. (2019). *Represi September: Konsolidasi Kapitalisme dan Gelombang Perlawanan Rakyat*. Indoprogres.
- Arnoni, L. K. (2012). *Challenging the Biopolitical: The Arab Spring and the Multitude*. Ohio University.
- Egberts, L. (2012). *A social movement shaped by a Multitude of shifting challenges and opportunities*. Utrecht University.
- Fournier, P. (2014). *The Multitude and localized protest: The example of the Quebec student strike*. Universite de Montreal.
- Kuddus, R. (2019). *September Surprise: The Uprising in Indonesia*. *New Left Review*
- Wiedemann, C. (2014). *Between swarm, network, and Multitude: Anonymous and the infrastructures of the common*. *Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory*
- Afiyanti, Y. (2008). *Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Keperawatan Indonesia* Vol. 12 No. 1
- Internet:**
- Admin. Tanpa Tahun. *The Collective Behavior Framework of Robert E. Park*. <http://www.periodicos.ufc.br/revciens/o/article/view>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2021.
- Admin. (2012). *Mahasiswa Bali Menolak Kenaikan Harga BBM*. <https://www.berdikarionline.com/mahasiswa-bali-menolak-kenaikan-harga-bbm/>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020.
- Anshori, S. (2019). *Ribuan Mahasiswa Bali Gelar Aksi #BaliTidakDiam*. <https://bali.bisnis.com/read/20190924/537/1151811/ribuan-mahasiswa-bali-gelar-aksi-balitidakdiam>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020.
- Hasanudin, M. (2013). *Mahasiswa di Bali Demo, Tuntut Presiden Cabut Harga BBM Baru*. <https://regional.kompas.com/read/2013/06/22/1906377/Mahasiswa.di.Bali.Demo.Tuntut.Presiden.Cabut.Harga.BBM.Baru>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020.
- Lahti, K. (2016). *Social Media As a Data Source*. <https://elicitinsights.com/blog/social-media-as-a-data-source/>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2021
- Prakoso, Y. & Gunawan, I. (2002). *Mahasiswa Bali Menolak Kenaikan BBM dan TDL*.

<https://www.liputan6.com/news/read/27529/mahasiswa-bali-menolak-kenaikan-bbm-dan-tdl/>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020.

Saming, S. (2017). *Gerakan Mahasiswa Sebagai Gerakan Sosial*.
https://www.academia.edu/39910758/GERAKAN_MAHASISWA_SEBAGAI_GERAKAN_SOSIAL. Diakses pada tanggal 9 Nopember 2020.

Suwanto, A. (2018). *Tolak UU MD 3 saat Jokowi Datang, Ini Tuntutan Aliansi BEM se-Bali*.
<https://radarbali.jawapos.com/read/2018/02/24/52038/tolak-uu-md3-saat-jokowi-datang-ini-tuntutan-aliansi-bem-se-bali>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020.